

ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN PER KAPITA DENGAN PENDEKATAN SEKTORAL ANTAR WILAYAH KEDUNGSEPUR TAHUN 2010-2017

ANALYSIS DISPARITY OF PER CAPITA INCOME WITH SECTORAL APPROACH BETWEEN KEDUNGSEPUR REGION IN 2010-2017

¹⁾Eka Mayang Sanditia, ²⁾Whinarko Juliprijanto, ³⁾Rusmijati

Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Abstrak

Pemerintah mendorong setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama antar wilayah/regional dalam rangka meningkatkan daya saingnya di perekonomian global. Di Jawa Tengah terdapat beberapa kerjasama regional yang telah terbentuk salah satunya kerjasama wilayah Kedungsepur. Namun kerjasama tersebut terdapat perbedaan pendapatan antar wilayah Kedungsepur yang dibuktikan dengan perbedaan pendapatan per kapita antar Kabupaten/Kota wilayahnya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar disparitas pendapatan per kapita antar wilayah di Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur dan sektor-sektor apa saja yang menyebabkan disparitas pendapatan per kapita. Metode analisis yang digunakan adalah Indeks Williamson dan Location Quotient. Berdasarkan hasil analisis Indeks Williamson menunjukkan bahwa disparitas pendapatan per kapita antar wilayah Kedungsepur dari tahun 2010-2017 terdapat kecenderungan meningkat dengan rata-rata disparitas pendapatan per kapita sebesar 0,8368 dan merupakan disparitas yang tinggi karena lebih dari 0,5. Berdasarkan analisis Location Quotient menunjukkan bahwa terdapat 9 sektor ekonomi yang mengakibatkan disparitas pendapatan per kapita di wilayah Kedungsepur.

Kata Kunci: disparitas pendapatan per kapita, indeks williamson, location quotient

Abstract

The government encourages every Regency/City to cooperate between district/regions in order to increase its competitiveness in the global economy. In Central Java there are several regional collaborations which have been formed, one of which is the collaboration of Kedungsepur region. However, this collaboration has differences in income between Kedungsepur region as evidenced by the high differences in per capita income between regencies/municipalities. This study aims to find out how much the per capita income disparity between the Regency/City regions of Kedungsepur region and any sectors that cause disparity in per capita income. The analytical method used in this study is the Williamson Index and Location Quotient. Based on the results of the Williamson Index analysis, the per capita income disparity between Kedungsepur regions from 2010-2017 has a tendency to increase with an average per capita income disparity of 0.8368 and a high per capita income disparity due to more than 0.5. Based on the Location Quotient analysis shows that there are 9 economic sectors that result in per capita income disparity in the Kedungsepur region.

Keywords: per capita income disparity, williamson index, location quotient

PENDAHULUAN

Pembangunan bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini berarti diperlukan suatu model perencanaan yang dapat mengidentifikasi atas keunggulan maupun kelemahan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah (Tarigan, 2016).

Akan tetapi kondisi daerah di Indonesia berdasarkan letak geografis dan sumberdaya alam yang berbeda, menyebabkan adanya daerah yang lebih makmur dan lebih maju dibandingkan daerah yang lainnya. Oleh karena itu kebijakan pembangunan dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan cara memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ada dan berbeda-beda bagi masing-masing daerah, serta mampu mengidentifikasi setiap potensi sektor- sektor potensial yang dimilikinya, kemudian menganalisisnya untuk membuat sektor-sektor tersebut memiliki nilai tambah bagi pembangunan ekonomi daerah. Proses tersebut dilakukan agar pembangunan

dapat dirasakan secara lebih merata. Untuk itu, perhatian pemerintah harus tertuju pada semua daerah tanpa ada perlakuan khusus pada daerah tertentu saja. Namun hasil pembangunan terkadang masih dirasakan belum merata dan masih terdapat kesenjangan antar daerah. Islami dan Nugroho (2018), menyatakan juga bahwa ada semacam *Trade Off* antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pemerataan pendapatan dalam suatu pembangunan ekonomi.

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang "Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian urusan, sumber daya manusia, dan pembiayaan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, serta juga telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya serta mengatur wilayahnya, baik dalam pengaturan sumber daya alam, sumber daya manusia maupun pengelolaan keuangan. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau biasa disebut dengan desentralisasi berimplikasi pada munculnya daerah otonom.

Otonomi daerah khususnya di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan dampak positif karena daerah otonom dapat dengan leluasa mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimilikinya guna mensejahterakan masyarakatnya. Guna menuju kemandirian, sudah saatnya daerah otonom harus menggali semua potensi yang dimilikinya. Pada tahap awal, pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi tiga pilar pengembangan wilayah yang dimilikinya yaitu potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi Mehrtens dan Abdurahman dalam Martono (2008:1). Selain dampak positif tersebut di atas, otonomi daerah juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa ego sektoral daerah, birokrasi daerah yang terlalu tinggi serta euforia daerah yang merasa tidak memerlukan lagi pemerintah pusat ataupun daerah lain. Guna mengantisipasi dampak negatif tersebut, Pemerintah mendorong setiap Kabupaten/Kota untuk melakukan kerjasama antar wilayah/regional dalam rangka meningkatkan daya saingnya di perekonomian global.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 terdapat beberapa kerjasama regional yang telah terbentuk, seperti: Kerjasama Regional Kedungsepur yang terdiri dari Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten

Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan; Kerjasama Regional Wanarakuti yang terdiri dari Juwana, Jepara, Kudus, Pati; Kerjasama Regional Subosukawonosraten yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten; Kerjasama Regional Bregasmalang yang terdiri dari Kabupaten Brebes, kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang; Kerjasama Regional Petanglong yang terdiri Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kota Pekalongan; Kerjasama Regional Barlingmascakeb yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Kebumen; Kerjasama Regional Purwomanggung yang terdiri dari Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung; Kerjasama Regional Banglor yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.

Kedungsepur merupakan Kawasan Tertentu dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional yang terdapat di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan terdapat di dalam Rencana Tata Ruang wilayah Nasional. Dengan demikian wilayah ini direncanakan sebagai pusat pertumbuhan nasional. Kerjasama regional wilayah Kedungsepur

sangat diperlukan guna meningkatkan daya saing yang lebih besar di tingkat nasional. Kerjasama Regional Kedungsepur telah dijalin sejak 21 Desember 1998 dengan penandatanganan MoU oleh Bupati/Walikota di 6 (enam) wilayah (Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan). Namun demikian kerjasama tersebut tidak berjalan efektif (Martono,2008:1) hingga perjanjian kerjasama tersebut telah habis masa berlakunya pada 20 Desember 2003. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2005 dilakukan perpanjangan nota kesepahaman (MoU) yang baru, kemudian di perpanjang lagi pada tanggal 11 April 2018 yang berisi kesepakatan menjalin kemitraan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, industri dan perdagangan, pembangunan sarana dan prasarana, perhubungan dan pariwisata, kebersihan dan kesehatan, pertanian dan pengairan, pendidikan dan kebudayaan, kependudukan, ketenaga-kerjaan, masalah sosial, serta keamanan dan ketertiban.

Kerjasama regional Kedungsepur yang belum berjalan secara efektif tersebut kemungkinan terjadi karena masing-masing daerah kabupaten/kota belum memiliki kesatuan dan kesamaan pandangan dalam melihat potensi yang dimiliki secara bersama. Selain itu, terjadinya disparitas antar daerah diduga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap masalah tersebut di atas. Disparitas yang terjadi antar daerah akan berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kedungsepur. Disparitas terjadi antara kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan dengan daerah hinterland-nya maupun antar daerah kabupaten/kota hinterland itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari kontribusi setiap kabupaten/kota terhadap PDRB Kedungsepur pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1. PDRB ADHK 2010 Wilayah Kedungsepur tahun 2017 dalam Juta Rupiah

Kabupaten/Kota	2017	Kontribusi(%)
Grobogan	17.617.254,27	7,86
Demak	16.537.579,21	7,37
Semarang	31.939.250,10	14,24
Kendal	27.586.097,11	12,30
Salatiga	8.589.009,54	3,83
Kota Semarang	122.000.440,38	54,40
Jumlah	224.269.630,61	100,00

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa kota Semarang sebagai pusat pertumbuhan memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kedungsepur dibandingkan dengan wilayah sekitarnya yaitu sebesar 54,40% dari total PDRB Kedungsepur tahun 2017 sebesar Rp.224.269.630,61. Sedangkan Kabupaten/kota yang lain hanya memberikan kontribusi sebesar 3,83% hingga 14,24%. Disamping itu jika dilihat PDRB antar kabupaten/kota hinterland Semarang, nampak bahwa Kabupaten Kendal dan kabupaten Semarang memberikan kontribusi yang lebih

besar dibanding dengan kota Salatiga, kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan.

Disparitas di wilayah Kedungsepur juga ditunjukkan dari nilai PDRB per kapita tiap Kabupaten/Kota. PDRB per kapita yang tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya bahwa PDRB perkapita yang rendah menunjukkan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB per kapita Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. PDRB Per Kapita ADHK 2010 Wilayah Kedungsepur Tahun 2017 dalam Rupiah

Kabupaten/Kota	PDRB Per kapita
Grobogan	12.904.456,25
Demak	14.498.063,87
Semarang	31.084.761,00
Kendal	28.824.874,82
Salatiga	45.461.810,85
Kota Semarang	69.409.689,79

Sumber: BPS Jawa Tengah, diolah

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang memiliki PDRB per kapita tertinggi yaitu Kota Semarang. Sedangkan PDRB per kapita Kabupaten Grobogan adalah yang terkecil di wilayah Kedungsepur. Besarnya PDRB perkapita kabupaten yang lainnya dapat dilihat pada tabel 1.2. Berdasarkan hal tersebut

kemungkinan terjadi disparitas pendapatan antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur. Dari uraian tersebut terlihat perbedaan PDRB per kapita antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur. Hal ini merupakan indikator adanya ketidakmerataan yang menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur.

Ketidakmerataan yang menyebabkan disparitas ini merupakan masalah yang harus dicari seberapa besarnya agar segera diketahui cara penyelesaiannya. Masalah yang timbul apabila disparitas tidak diketahui besarnya yaitu menimbulkan terjadinya konflik dan meningkatkan angka kriminalitas, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus bisa menyebabkan ketidakstabilan didalam suatu perekonomian. Oleh karena itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar disparitas antar kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur. Kemudian menentukan sektor-sektor basis dan non basis di tiap Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur untuk mengetahui sektor apa saja yang mengakibatkan disparitas pendapatan per kapita agar pendapatan perekonomian daerah dapat tercapai secara optimal dan meningkatkan pendapatan penduduk, sehingga menjadikan ketimpangan lebih rendah. Indrawati dan Sugiharti (2018), "*Shift Share Method is descriptive method where the ability of the analysis is to give general description on the object of research*". Sebelumnya dalam penelitian terdahulu

Saputri (2017) dinyatakan bahwa rasio produktivitas sektor pertanian dan industri secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan bermakna terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah 2006-2015. Sehingga perlu kiranya untuk mencari sektor manakah yang menyebabkan ketimpangan di kabupaten/kota kedungsepur tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah PDRB, jumlah penduduk, PDRB per kapita.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan menggunakan data yang berkaitan dengan objek penelitian yang didapatkan dari kantor statistik maupun melalui literature-literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian ini. Data penelitian ini dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang meliputi BPS Jawa Tengah, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kota Salatiga, Kota Semarang tahun 2010-2018.

Teknis Analisis Data

1. Analisis Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengetahui ada tidaknya disparitas atau ketimpangan yang terjadi dan seberapa besar ketimpangan tersebut. Indeks Williamson :

$$IW = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2 f \int n}}{Y}$$

Sumber : Destiningsih, 2017

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = Pendapatan perkapita pada wilayah studi

Y = Pendapatan perkapita pada wilayah referensi

f_i = jumlah penduduk pada wilayah studi

n = jumlah penduduk pada wilayah referensi

Adapun kriteria dalam disparitas, yaitu (Destiningsih, 2017: 76) :

- a. Indeks Williamson $<0,35$; bermakna tidak terdapat disparitas.
- b. Indeks Williamson $0,35-0,5$; bermakna disparitas sedang.
- c. Indeks Williamson $>0,5$; bermakna disparitas tinggi

2. Analisis Location Quotient (LQ)

Teknik analisa LQ merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan

kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relative ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut :

$$\frac{S \int S}{N \int N}$$

Sumber : Tarigan, 2016

Keterangan :

LQ = Besarnya Location Quotient

Si = PDRB sektor i pada wilayah studi

S = Total PDRB di wilayah studi

Ni = PDRB sektor i pada wilayah referensi

N = Total PDRB wilayah referensi

Adapun kesimpulan yang dapat diambil untuk menentukan sektor basis atau bukan basis dapat dilihat nilai LQnya, yaitu (Tarigan, 2016:82) :

- a. $LQ > 1$ berarti sektor atau subsektor atau komoditas tersebut dikategorikan sebagai sektor atau subsektor atau komoditas basis atau sektor ekspor atau sektor unggulan. Daerah penelitian lebih berspesialisasi dalam memproduksi sektor atau subsektor atau komoditas i dibandingkan sektor atau subsektor atau komoditas i daerah referensi. Hal tersebut berarti daerah penelitian mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (sektor basis).
- b. $LQ = 1$ berarti bahwa daerah tersebut telah mencukupi dalam kegiatan tertentu. $LQ = 1$ disebut *self-sufficient* atau swasembada kondisi tersebut jarang terjadi, baik didaerah penelitian maupun

daerah referensi yang sama derajat spesialisasinya dalam memproduksi sektor atau subsektor atau komoditas i.

- c. $LQ < 1$ berarti sektor atau subsektor atau komoditas tersebut dikategorikan sebagai sektor atau subsektor atau komoditas non basis atau sektor local atau bukan sektor unggulan. Daerah penelitian tidak berspesialisasi dalam memproduksi sektor atau subsektor atau komoditas i dibandingkan dengan sektor atau subsektor atau komoditas daerah referensi. Hal ini berarti bahwa daerah penelitian mempunyai impor dalam kegiatan tertentu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil yang Dicapai Berdasarkan Luaran Program

1. Indeks Williamson

Tabel 1.2. Hasil Perhitungan Indeks Williamson Wilayah Kedungsepur tahun 2010-2017

Indeks Williamson

2010	0,8381
2011	0,8379
2012	0,8375
2013	0,8372
2014	0,8368
2015	0,8362
2016	0,8357
2017	0,8352
Rata-rata	0,8368

Sumber: Hasil Perhitungan Indeks Williamson, 2019

Berdasarkan table 3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2017 angka disparitas pendapatan perkapita Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur berdasarkan Indeks Williamson yaitu dengan rata-rata sebesar 0,8368. Angka ini menunjukkan bahwa di wilayah Kedungsepur pendapatan per kapita wilayahnya lebih dari 0,5 maka terjadi disparitas pendapatan per kapita yang tinggi dan berarti pendapatan per kapitanya tidak merata.

Disparitas pendapatan per kapita antar wilayah Kedungsepur dari tahun 2010-2017 terdapat kecenderungan menurun meskipun

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa pada tahun 2010-2017 di Kabupaten Grobogan, terdapat 10 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 7 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$. Adapun Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kabupaten Grobogan untuk tahun 2010-2017. Di Kabupaten Demak, terdapat 6 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 11 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kabupaten Demak untuk tahun 2010-2017.

Di Kabupaten Semarang, terdapat 4 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 13 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$. Sektor

tidak signifikan penurunannya. Pada tahun 2010 nilai indeks Williamson sebesar 0,8381 turun menjadi 0,8379 pada tahun 2011. Kemudian turun pada tahun 2012 sebesar 0,8375. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 0,8372 lalu turun lagi pada tahun 2014 sebesar 0,8368. Penurunan juga terjadi pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017, dimana nilai indeks Williamson sebesar 0,8362 pada tahun 2015 dan 0,8357 pada tahun 2016 serta sebesar 0,8352 pada tahun 2017.

2. Location Quotien

Industri Pengolahan merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kabupaten Semarang untuk tahun 2010-2017.

Sedangkan di Kabupaten Kendal, terdapat 4 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 13 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kabupaten Kendal untuk tahun 2010-2017.

Di Kota Salatiga, terdapat 10 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 7 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$. Sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kota Salatiga untuk tahun 2010-2017.

Di Kota Semarang terdapat 9 sektor yang memiliki nilai $LQ > 1$ dan 8 sektor yang memiliki nilai $LQ < 1$. Sektor Konstruksi merupakan sektor yang memiliki nilai LQ yang paling tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lainnya di Kota Semarang untuk tahun 2010-2017.

Pembahasan

a. Disparitas Pendapatan Per Kapita

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson pada tabel 3 besar disparitas pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di wilayah Kedungsepur selama tahun 2010-2017 sebesar 0,8368. Hal ini berarti bahwa di wilayah Kedungsepur telah terjadi disparitas pendapatan per kapita antar Kabupaten/Kota pada tingkat level tinggi, hal ini ditunjukkan dengan besarnya indeks Williamson yang rata-rata di atas 0,5. Dengan tingginya besar indeks Williamson di wilayah Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur berarti pendapatan per kapita pada wilayah Kedungsepur tidak merata.

b. Sektor-sektor yang mengakibatkan disparitas pendapatan per kapita

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa terdapat 9 sektor yang hanya basis di satu atau dua Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur, hal tersebut membuktikan adanya pemusatan sektor-sektor tersebut di beberapa Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur, sehingga mengakibatkan disparitas pendapatan per kapita. Adapun kesembilan sektor tersebut, yaitu:

1. Sektor Konstruksi

Kabupaten/Kota yang sektor konstruksinya non basis adalah Kabupaten Grobogan; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor konstruksinya basis adalah Kota Semarang.

2. Sektor Informasi dan Komunikasi

Kabupaten/Kota yang sektor informasi dan komunikasinya non basis adalah Kabupaten Grobogan; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor informasi dan komunikasinya basis adalah Kota Semarang.

3. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas

Kabupaten/Kota yang sektor pengadaan listrik dan gasnya non basis adalah Kabupaten Grobogan; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor pengadaan listrik dan gasnya basis adalah Kabupaten Kendal dan Kota Salatiga.

4. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kabupaten/Kota yang sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang non basis adalah Kabupaten Grobogan; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; dan Kabupaten Kendal. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor pengadaan air, pengelolaan sampah basis adalah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

5. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kabupaten/Kota yang sektor penyediaan akomodasi dan makan minumannonbasis adalah Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor penyediaan akomodasi dan makan minumannya basis adalah Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga.

6. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi

Kabupaten/Kota yang sektor jasa keuangan dan asuransi non basis adalah Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; dan Kota Salatiga. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor jasa keuangan dan asuransinya basis adalah Kabupaten Magelang dan Kota Semarang.

7. Sektor Jasa Perusahaan

Kabupaten/Kota yang sektor jasa perusahaan non basis adalah Kabupaten Grobogan; Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; dan Kabupaten Kendal. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor jasa perusahaannya basis adalah Kota Salatiga dan Kota Semarang.

8. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Kabupaten/Kota yang sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosialnya non basis adalah Kabupaten Demak; Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial basis

adalah Kabupaten Grobogan dan Kota Salatiga.

9. Sektor Jasa lainnya

Kabupaten/Kota yang sektor jasa lainnya non basis adalah Kabupaten Semarang; Kabupaten Kendal; Kota Salatiga; dan Kota Semarang. Sedangkan Kabupaten/Kota yang sektor jasa lainnya basis adalah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak.

Simpulan

1. Dari hasil analisis Indeks Williamson dapat diperoleh bahwa disparitas pendapatan perkapita antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur selama tahun 2010-2017 mendekati 1 yaitu dengan rata-rata sebesar 0,8368. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pendapatan perkapita yang tinggi antar Kabupaten/Kota di wilayah Kedungsepur.
2. Dari hasil analisis Location Quotient, sektor-sektor yang mengakibatkan disparitas adalah sektor konstruksi; sektor informasi dan komunikasi; sektor pengadaan listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor jasa perusahaan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya

Implikasi

1. Bagi pemerintah Disparitas pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur relatif tinggi. Oleh karena itu, Kabupaten/Kota wilayah Kedungsepur harus mengembangkan peranan sektor non basis untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto wilayahnya.
2. Pemerintah daerah mengubah sektor non basis menjadi sektor basis dengan membuat kebijakan perekonomian yang memiliki *multiplier effect* yaitu keterkaitan antar sektor basis maupun non basis sehingga tidak hanya satu sektor saja yang merasakan efeknya namun juga sektor-sektor lainnya sehingga sektor-sektor tersebut mampu tumbuh secara bersama-sama.
3. Peningkatan perekonomian antar wilayah dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh masing-masing Kabupaten/Kota tersebut dan membuat kebijakan perekonomian yang memprioritaskan pada kerjasama antar wilayah untuk ditingkatkan pada sektor non basis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aidar, Nur dan Ramadhan Syahputra. 2015. "Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh". *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik.*, Volume 2, Nomor 1, Halaman 56-68.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi daerah, Edisi I, Yogyakarta : BPF.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Kabupaten Demak Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kabupaten Demak. 2018. Kabupaten Grobogan Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kabupaten Grobogan. 2018. Kabupaten Kendal Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kabupaten Kendal. 2018. Kabupaten Semarang Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kabupaten Semarang. 2018. Kota Salatiga Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kota Salatiga. 2018. Kota Semarang Dalam Angka 2010-2018.
- BPS Kota Semarang. 2018. Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2010-2108.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2010. RPJMD Kabupaten Demak tahun 2011-2016.
- BAPPEDA Kabupaten Demak. 2005. RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2006-2011.
- BAPPEDA Kabupaten Grobogan. 2009. RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2010 - 2015.
- BAPPEDA Kabupaten Kendal. 2009. RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2010 - 2015.

- BAPPEDA Kabupaten Semarang. 2009. RPJMD Kota Salatiga tahun 2010-2015.
- BAPPEDA Kota Salatiga. 2009. RPJMD Kota Semarang tahun 2010-2015.
- Baransano, Michael Albert dkk. 2016. "Analysis of Factors Affecting Regional Development Disparity in the Province Of West Papua". *Journal Of Economics And Development Studies*, Volume 4, Nomor 2, Pp. 115-128.
- Cahyono, Hendri dkk. 2017. "Income Disparity in Gerbangkertosusila Area of East Java Indonesia". *International Journal Of Economics And Financial Issues*, Volume 7, Nomor 1, Pp. 14-18.
- Destiningsih, Rian. 2017. "Ekonomi Pengembangan Regional". Yogyakarta : Graha Cendekia.
- Indrawati, Lucia Rita dan Sugiharti, Rr. Retno. 2018. "International Conference on Economics, Bussiness and Economic Education 2018". Volume 2018, Pages 680-689.
- Islami, Fitrah Sari dan Nugroho, SBM. 2018. "Faktor-Faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Timur, Indonesia". *Media Ekonomi dan Manajemen*. Volume 33, Nomor 1, Halaman 29-39.
- Iswanto, Denny. 2015. "Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 4, Nomor 1, Halaman 1-26.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. "Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan". Yogyakarta : UPP AMP
- YKPN. 2004. "Analisis Spasial dan Regional". Yogyakarta : AMP YKPN.
- Mahardiki, Doni dan Rokhedi Priyo Santoso. 2013. "Analisis Perubahan Ketimpangan Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Propinsi di Indonesia 2006-2011". *Jejak Journal Of Economics And Policy*. Volume 6, Nomor 2, Halaman 171-193.
- Martono, Primasto Ardi. 2008. "Keterkaitan Antar Sektor Ekonomi Dan Antar Daerah Di Wilayah Kedungsepur". Tesis, Desember 2008. Semarang.
- Masnawi, Achmad dkk. 2015. "Analysis of Regional Growth and Development Disparities in Mamuju Regency, West Sulawesi". *International Journal Of Management Research And Business Strategy*. Volume 4, Nomor 3, Halaman 141-149.
- Mauliddiyah, Alfiana. 2014. "Analisis Disparitas Regional dan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Kota Batu

- Tahun 2002-2012)". *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*. Volume 6, Nomor 2, Halaman 156-163.
- Muthalib, Abd Azis. 2017. "Analysis of Economic Growths and Development Gaps Between Cities in Southeast Sulawesi". *International Journal Of Economics And Financial Issues*. Volume 7, Nomor 2, Pp. 125-128.
- Nurpita, Anisa dan Aulia Agni Nastiti. 2016. "The Analysis of Development Disparities Inter Districts/City in Special Region Of Yogyakarta (DIY) Province 2003-2013". *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, Volume 20, Nomor 1, Halaman 23-37.
- Saputri, Rose Gita Cahaya. 2017. "Pengaruh Produktivitas Sektoral dan Laju PDRB terhadap Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah pada Tahun 2006-2015". *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. Volume 2, Nomor 2, Halaman 103-112.
- Sjafrizal. 2008. "Ekonomi Regional (Teori dan Aplikasi)". Padang : Baduose Media.
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung : CV. Alfabeta.
- Suseno, Dedy Aji. 2015. "Pengembangan Daerah Berdasarkan Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Sektor Di Wilayah Kedung Sepur". *JEJAK Journal of Economics and Policy*. Volume 8, Nomor 1, Halaman 54-61.
- Tambunan. 2001. "Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris". Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tarigan, Drs Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____.2016. "Perencanaan Pembangunan Wilayah". Jakarta : Bumi Aksara.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C Smith. 2011. "Pembangunan Ekonomi Edisi 11 Jilid 1". Jakarta : Erlangga.
- Wicaksono, Cholif Prasetio. 2010. "Analisis Disparitas Pendapatan Antar Kabupaten/Kota Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2007". Skripsi. Semarang : FE UNDIP.

LAMPIRAN

Tabel 4. Hasil Perhitungan Location Quotient Wilayah Kedungsepur tahun 2010-2017.

Uraian	Daerah					
	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Demak	Kabupaten Semarang	Kabupaten Kendal	Kota Salatiga	Kota Semarang
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,27	2,65	1,24	2,31	0,53	0,10
Pertambangan dan Penggalian	3,44	1,34	0,77	1,72	0,17	0,55
Industri Pengolahan	0,38	0,96	1,33	1,41	1,03	0,91
Pengadaan Listrik dan Gas	0,73	0,77	0,94	1,58	1,71	0,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,53	0,84	0,92	0,95	1,00	1,12
Konstruksi	0,30	0,46	0,70	0,35	0,75	1,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,42	1,10	0,77	0,83	0,96	1,03
Transportasi dan Pergudangan	1,54	0,91	0,65	0,67	1,02	1,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,32	0,76	0,88	0,95	2,27	0,94
Informasi dan Komunikasi	0,42	0,33	0,56	0,59	0,61	1,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,07	0,66	0,91	0,53	0,99	1,17
Real Estate	0,87	0,50	1,16	0,33	1,98	1,13
Jasa Perusahaan	0,51	0,48	0,87	0,54	2,20	1,20
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,10	1,14	0,90	0,64	1,76	1,02
Jasa Pendidikan	1,61	1,40	1,12	0,84	1,57	0,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	0,98	0,89	0,86	1,90	0,95
Jasa lainnya	1,99	1,85	0,82	0,94	0,73	0,82